

GELONTORKAN RP 70 MILIAR UNTUK INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN, PEMKAB MERANTI UCAPKAN TERIMAKASIH KE PEMPROV RIAU



Sumber gambar:

<https://koran.tempo.co/read/opini/473591/klaim-prestasi-jalan-tol-jokowi-pembangunan-infrastruktur-dan-pertumbuhan-ekonomi>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp70.655.732.000 untuk penanganan jalan ruas provinsi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Proyek perbaikan jalan ini merupakan salah satu upaya Pemprov Riau untuk meningkatkan infrastruktur di daerah tersebut. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat.

Proses lelang proyek perbaikan jalan ini telah selesai dan akan segera dikerjakan oleh kontraktor pemenang lelang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau telah menyurati Bupati Kepulauan Meranti dengan tembusan beberapa pihak, diantaranya Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Dalam surat tersebut, pihak PUPR-PKPP Provinsi Riau menyatakan harapannya agar semua pihak terkait dapat bekerja sama demi kelancaran proyek ini dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan dapat berfungsi dengan baik pada akhir tahun 2024.

Adapun proyek tersebut diantaranya berada di Kecamatan Tebingtinggi Barat yakni penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, berkala dan, peningkatan reconstruksi) ruas Jalan Selat Panjang-Alai-Kampung Balak menggunakan anggaran DAK senilai Rp 18.955.732.000.

Selanjutnya infrastruktur yang menggunakan APBD Riau yakni pembangunan Jalan Kampung Balak - Kundur senilai Rp 15.000.000.000 dengan nilai kontrak Rp 14.530.481.405 yang dikerjakan CV. Vianda Jaya Abadi.

Kemudian di Kecamatan Tasik Putripuyu ada pembangunan Jembatan Selat Akar, ruas Jalan Tanjung Padang senilai Rp 36.700.000.000 dengan nilai kontrak 35.104.482.305 yang dikerjakan PT Ninoya Cakti Karya Utama.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pembangunan infrastruktur oleh Pemprov Riau.

"Kami tentunya sangat mendukung proyek ini dan berkomitmen untuk mengawal hingga pekerjaan selesai. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kendala yang berarti sehingga masyarakat bisa segera menikmati hasilnya," kata Fajar, Selasa (4/6/2024) sore.

Fajar juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau atas alokasi anggaran yang signifikan ini untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap agar ke depannya semakin besar dana provinsi yang digelontorkan ke Meranti, terutama untuk infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kami juga sangat berterima kasih kepada Pemprov Riau dalam hal ini Pj Gubernur yang telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di kabupaten termuda di Riau ini. Ini adalah langkah besar untuk kemajuan daerah kami," tambahnya.

Dengan adanya komitmen ini, Fajar juga menegaskan bahwa tidak benar jika ada anggapan Pemprov Riau tidak memperhatikan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sudah banyak alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan yang berada di ruas provinsi. Pemprov Riau juga melakukan normalisasi dan restorasi sungai di beberapa desa, selain itu juga membangun sea wall dan pengaman pantai serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa," jelas Fajar

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menyambut baik pengalokasian anggaran yang diberikan kepada daerahnya. Dengan perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya, diharapkan akses transportasi dan distribusi barang menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.

"Kami sangat berterima kasih atas alokasi anggaran yang signifikan ini untuk perbaikan jalan di wilayah kami. Peningkatan infrastruktur adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Asmar.

Proyek perbaikan jalan ini mencakup beberapa ruas jalan utama yang menjadi penghubung antar kecamatan di Kepulauan Meranti. Dengan terlaksananya proyek ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperlancar distribusi barang dan jasa.

Dengan alokasi anggaran dan persiapan yang matang, diharapkan proyek perbaikan jalan ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

"Kami dari Pemkab Kepulauan Meranti mendukung penuh proyek ini dan memastikan tidak ada kendala yang berarti. Karena infrastruktur ini masyarakat kita juga yang akan menikmatinya," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.halloriau.com/read-meranti-1453525-2024-06-05-gelontorkan-rp-70-miliar-untuk-infrastruktur-jalan-dan-jembatan-pemkab-meranti-ucapkan-terimakasih-ke-pemprov-riau.html>, 05/06/2024
2. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/18554/pemprov-riau-alokasikan-anggaran-infrastruktur-jalan-dan-jembatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti-rp-.html>, 05/06/2024

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pengertian masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Nasional,

Jalan Nasional terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Strategis Nasional;

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai

dengan wilayah kerjanya masing-masing. Ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

2. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- c. Jalan Strategis Provinsi;
- d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

3. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota;
- d. Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

4. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota dan merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

5. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.